



PUTUSAN

Nomor 407/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA, berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 760-762, Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, diwakili oleh **LEONARD SOEDHARMA** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SETYANTO DHARMA PRANA, pekerjaan Kepala Pembukuan, beralamat di Kp. Gutitan 21 Semarang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2011.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta 13230.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Oktober 2010 No. Putusan 26559/PP/M.XIV/19/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2422/BC.8/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPB Nomor : S-002126/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 29 Mei 2008 oleh Terbanding yang pada pokoknya memutuskan bahwa keberatan Pemohon Banding yang

Hal 1 dari 19 hal. Put. No. 407/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dengan surat keberatan Nomor : 168/V/IMP-SSJ/2008 tanggal 30 Mei 2008 ditolak dan menetapkan nilai pabean menjadi USD 25,647.50;

Bahwa alasan mengajukan banding adalah nilai pabean yang Pemohon Banding cantumkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 0010945 tanggal 16 Mei 2008 merupakan harga transaksi yang sebenarnya sesuai dengan *Invoice* Nomor: SUZM13962 tanggal 17 April 2008 dan *Packing List* Nomor : SUZM13962 tanggal 17 April 2008 dan *Sales Contract* Nomor : 08JSCTDYIE13962 tanggal 7 April 2008;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Oktober 2010 No. Putusan 26559/PP/M.XIV/19/2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2422/BC.8/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-002126/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 29 Mei 2008, atas nama: PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP: 01.985.563.4.511.000, alamat: Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan menetapkan nilai pabean sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2422/BC.8/2008 tanggal 24 Juli 2008 sebesar CIF USD 25,647.50 sehingga Bea Masuk Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPBM Nomor: S-002126/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp150.235.210,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Oktober 2010 No. Putusan 26559/PP/M.XIV/19/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 26 Nopember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-126/SP.52/AB/I/2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pengguguran Nilai Transaksi (Metode I) oleh Termohon.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menolak nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 0010945 tanggal 16 Mei 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007. Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean.
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Hal 3 dari 19 hal. Put. No. 407/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau.
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi:

Bahwa Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean, dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor kami bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini ;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- b. Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a. antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
 - (1) Diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean.
 - (2) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan.
 - (3) Tidak mempengaruhi harga barang secara substantial .

dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan atas impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 0010945 tanggal 16 Mei 2008 jenis barang Paint Brush (14 Jenis Barang) negara asal China sebesar CIF USD 12,513.00 telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena ;

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut.

Pasal 7 huruf c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau.

Pasal 7 huruf d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi:

Berdasarkan ketentuan huruf c dan huruf d, di atas Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan data-data yang obyektif dan terukur untuk

Hal 5 dari 19 hal. Put. No. 407/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak/menggugurkan nilai transaksi, yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, sehingga hal ini kami katakan, bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali, merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan kembali bahwa ;

- Termohon Peninjauan Kembali telah menolak nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

oleh karenanya penolakan pemberitahuan nilai transaksi dari Pemohon Banding oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah.

2. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali atas penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor : KEP-2422/BC.8/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-002126/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 29 Mei 2008, atas nama: PT. Suryasemarang Sukses Jayatama dalam menetapkan nilai pabean tidak memberikan alasan atau metode yang digunakan untuk penetapan, oleh karena itu dapat kami katakan bahwa Penetapan nilai pabean oleh Termohon tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa karena Termohon tidak memberitahukan Metode Penetapan Nilai Pabean yang mereka gunakan untuk menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor : 0010945 tanggal 16 Mei 2008, maka kami coba untuk mengemukakan Ketentuan Metode Penetapan Barang Impor sebagai berikut;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007.

ayat (2) Nilai Pabean untuk menghitung bea masuk ditetapkan dengan menggunakan satu dari enam metode penetapan sebagai berikut :

- a. Metode I Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan;
- b. Metode II Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang Identik;
- c. Metode III Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa;
- d. Metode IV Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode deduksi;
- e. Metode V Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode Komputasi;
- f. Metode VI Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi berdasarkan tatacara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan pasal VII GATT 1994 berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu;

Bahwa karena Termohon dalam menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor : 0010945 tanggal 16 Mei 2008 tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penetapan nilai pabean nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan lagi bahwa ; Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas dan tidak terukur dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Hal 7 dari 19 hal. Put. No. 407/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku; oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 0010945 tanggal 16 Mei 2008, tidak sah;

Bahwa karena penolakan/pengguguran nilai transaksi dan penetapan nilai pabean yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 0010945 tanggal 16 Mei 2008, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2422/BC.8/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-002126/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 29 Mei 2008, atas nama: PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP: 01.985.563.4-511.000, alamat: Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N. Semarang menjadi tidak sah;

FAKTA-FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN BANDING

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 26559/PP/M.XIV/19/2010, diketahui bahwa Termohon Tidak Pernah hadir dalam Persidangan Banding;

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam keputusannya Nomor: 26559/ PP/M.XIV/19/2010 tanggal 29 Oktober 2009. Diucapkan hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, menyatakan antara lain sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan:

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean:

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007. Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean.
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor : 0010945 tanggal 16 Mei 2008 sebesar CIF USD 12,513.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya:

Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan Surat Uraian Banding, maka Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

Bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

Bahwa memenuhi permintaan Majelis. Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa :

1. *Purchasing Order* Nomor : 082/IDP-SSJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008;
2. *Sales Confirmation* Nomor: 08JSCTDYIE13962 tanggal 7 April 2008;
3. *Invoice* Nomor: SUZM13962 tanggal 17 April 2008;
4. *Packing List* Nomor : SUZM13962 tanggal 17 April 2008;
5. *Bill Of Lading* Nomor: APLU 064611397 tanggal 2 Mei 2008;
6. *Marine Cargo Policy* PT. Asuransi Raya Nomor : MC-0408.6626 tanggal 2 Mei 2008;
7. PIB Nomor: 0010945 tanggal 16 Mei 2008;

Hal 9 dari 19 hal. Put. No. 407/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal Nomor: 012094/WBC.06/KP.0103/2008 tanggal 2 Juni 2008;
9. Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 19 Mei 2008 sebesar USD 12,513.00;
10. Rekening Koran Bank Niaga periode Mei 2008;
11. Buku Kas Besar Mei 2008;
12. Buku Utang;
13. Buku Bank;
14. Buku Besar Utang Dagang;
15. Kartu Stock;
16. Surat Jiangsu Ctd Import & Eksport Co., Ltd, China;

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada pemasok Surat Jiangsu Ctd Import & Eksport Co., Ltd, China, dengan menggunakan *Purchasing Order* Nomor : 082/IDP-SSJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, dengan perincian jenis barang sebagai berikut:

Description of Goods	Quantities	Unit Price (USD)	Amount (USD)
"FUKUDA" BRAND PAINT BRUSH NO. 633 3/4"	2000	0.130	
1"	2000	0.170	260.00
1.5"	3000	0.210	340.00
2"	4000	0.250	630.00
2.5"	3000	0.290	1,000.00
3"	4000	0.330	870.00
4"	3000	0.360	1,320.00
5"	750	0.400	1,080.00
NO. 800 5"	550	0.360	300.00
1"	2000	0.170	198.00
2"	2000	0.210	340.00
3"	500	0.290	420.00
4"	3000	0.330	145.00
"101" BRAND DRAWER LOCK			990.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14000	0.330	4,620.00
	CNF Semarang		12,513.00

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak Supplier Jiangsu Ctd Import & Eksport Co., Ltd, China yaitu membuat *Sales Confirmation* Nomor: 08JSCTDYEE13962 tanggal 7 April 2008, dengan perincian sebagai berikut:

Description of Goods	Quantities	Unit Price (USD)	Amount (USD)
"FUKUDA" BRAND PAINT BRUSH	2000	0.130	
NO. 633 3/4"			
1"	2000	0.170	260.00
1.5"	3000	0.210	340.00
2"	4000	0.250	630.00
2.5"	3000	0.290	1,000.00
3"	4000	0.330	870.00
4"	3000	0.360	1,320.00
5"	750	0.400	1,080.00
NO. 800 5"	550	0.360	300.00
1"	2000	0.170	198.00
2"	2000	0.210	340.00
3"	500	0.290	420.00
4"	3000	0.330	145.00
"101" BRAND DRAWER LOCK			990.00
	14000	0.330	4,620.00
	CNF Semarang		12,513.00

Term of Payment : T/T;

Bahwa pihak Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan *Bill Of Lading* Nomor: APLU 064611397 tanggal 2 Mei 2008 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 11 dari 19 hal. Put. No. 407/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipper : Jiangsu Ctd Import & Eksport Co., Ltd, China;

Consignee : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama;

Port of Loading : Shanghai;

Port of Discharge : Semarang;

Description of Goods : Paint Brush;

Gross Weight : 30.280.00 kgs;

Bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan

Invoice Nomor : SUZM13962 tanggal 17 April 2008 dan *Packing List* Nomor :

SUZM13962 tanggal 17 April 2008 dengan perician sebagai berikut:

Description of Goods	Quantities	Unit Price (USD)	Amount (USD)
"FUKUDA" BRAND PAINT BRUSH	2000	0.130	
NO. 633 3/4"			
1"	2000	0.170	260.00
1.5"	3000	0.210	340.00
2"	4000	0.250	630.00
2.5"	3000	0.290	1,000.00
3"	4000	0.330	870.00
4"	3000	0.360	1,320.00
5"	750	0.400	1,080.00
NO. 800 5"	550	0.360	300.00
1"	2000	0.170	198.00
2"	2000	0.210	340.00
3"	500	0.290	420.00
4"	3000	0.330	145.00
"101" BRAND DRAWER LOCK			990.00
	14000	0.330	
			4,620.00
			12,513.00
	CNF Semarang		

Net Wight : 27,590.00 kgs

Gross Weight : 30,280.00 kgs

Bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan

dengan Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor : MC-0408.6626



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2008 untuk *Invoice* Nomor: SUZM13962 tanggal 17 April 2008 dan dengan *Bill Of Lading* Nomor: APLU 064611397 tanggal 2 Mei 2008 ;

Bahwa barang impor berupa *Paint Brush (14 Jenis Barang)* dengan *Bill of Lading* Nomor : APLU 064611397 tanggal 2 Mei 2008, *Invoice* Nomor: SUZM13962 tanggal 17 April 2008, dan *Packing List* Nomor : SUZM13962 tanggal 17 April 2008 telah diberitahukan dalam PIB Nomor : 0010945 tanggal 16 Mei 2008 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 12,513.00;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 0010945 tanggal 16 Mei 2008 adalah dari Jiangsu Ctd Import & Eksport Co., Ltd, China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 12,513.00; telah sesuai dengan *Invoice* Nomor: SUZM13962 tanggal 17 April 2008. *Packing List* Nomor : SUZM13962 tanggal 17 April 2008. dan *Bill Of Lading* Nomor: APLU 064611397 tanggal 2 Mei 2008:

Bahwa atas barang impor dengan *Invoice* Nomor: SUZM13962 tanggal 17 April 2008 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti *Transfer Bank Niaga* tanggal 19 Mei 2008 dan bukti *Rekening Koran Bank Niaga* tanggal 19 Mei 2008 sebesar USD 12,513.00 dan bukti *Rekening Koran Bank Niaga* tanggal 27 Mei 2008, dan telah dimasukkan dalam kartu stok tanggal 3 Juni 2008 dan dibukukan dalam *Buku Kas Besar* tanggal 19 Mei 2008, *Buku Bank* tanggal 19 Mei 2008, serta *Buku Besar Utang Dagang* tanggal 19 Mei 2008;

Bahwa "*best practices*" dalam melaksanakan ketentuan *Article 17* dan *Ministrial Decision 6.1* tersebut di atas. sebagaimana diuraikan dalam:

- *World Customs Organization (WCO) Handbook of Customs Valuation Control*;
- *WCO Technical Committee on Customs Valuation Intruments. Case Study 13.1. atau*
- *ASEAN Customs Valuation Guide*;

digunakan parameter "harga pembanding" untuk menguji apakah "*the declared value is realistic in the light of the commercial practices of industry and identical or similar goods*"

Hal 13 dari 19 hal. Put. No. 407/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberitahuan nilai pabean yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk jenis barang antara lain 26" CKD Bicycle (Sepeda) No. 2625, harga satuan sebesar CIF USD 6.50/set atau setara dengan Rp1.201,00/set (USD 1.00=Rp9.234.00);

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah dibanding harga pasar sehingga Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode VI fleksible Metode IV dengan penyesuaian sebesar CIF USD 25,647.50 sudah benar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas. Majelis berkesimpulan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan dan menolak permohonan banding Pemohon Banding:

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 26559/PP/M.XIV/19/2010, diketahui bahwa Termohon Tidak Pernah hadir dalam Persidangan banding;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga Termohon tidak dapat menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 0010945 tanggal 16 Mei 2008;

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membenarkan alasan yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali untuk menggugurkan harga transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor: 0010945 tanggal 16 Mei 2008 untuk barang berupa *Paint Brush* (14 Jenis Barang) dari Cina, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 12,513.00 terlalu rendah; dan kemudian Termohon ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 25,647.50, dapat kami kemukakan kembali secara singkat sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor kami, bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku.

Jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini.;

- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC71999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- b. Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
 - (i) diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean.
 - (ii) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan .
 - (iii) Tidak mempengaruhi harga barang secara substantial .

Dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan terhadap impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 0010945 tanggal 16 Mei 2008 jenis barang berupa *Paint Brush* (14 Jenis Barang) dari China sebesar CIF USD 12,513.00

Hal 15 dari 19 hal. Put. No. 407/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena ;

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut.

Pasal 7 ayat.....

- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi:

Dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 0010945 tanggal 16 Mei 2008 sebesar CIF USD 12,513.00 adalah harga yang sebenarnya sebagaimana telah kami jelaskan diatas akan tetapi harga tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dan oleh Termohon nilai transaksi tersebut ditambah sehingga menjadi sebesar CIF USD 25,647.50 tanpa data yang obyektif dan terukur untuk masin-masing barang, dan tanpa metode penetapan yang jelas, dengan demikian penetapan nilai pabean yang ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak syah;

Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya membenarkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali padahal Keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut ditetapkan tanpa data yang obyektif dan tidak berdasarkan metode penetapan nilai pabean, sehingga keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Nomor : KEP-2422/BC.8/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor: S-002126/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 29 Mei 2008 tidak syah ;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Pajak merujuk pada putusan Termohon yang tidak syah maka putusan Pengadilan Pajak tersebut juga menjadi tidak syah.

Bahwa sebagai bukti kebenaran nilai transaksi yang kami beritahukan, kami telah menyerahkan bukti-bukti tersebut diatas baik yang asli maupun foto kopinya kepada Majelis Hakim Pajak dan telah diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ;

Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pajak telah diuraikan pula bukti-bukti transaksi yang kami lakukan yang kurang lebih sebagai berikut : bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: SUZM13962 tanggal 17 April 2008 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Transfer Bank Niaga tanggal 19 Mei 2008 sebesar USD 12,513.00 dan bukti Rekening Koran Bank Niaga tanggal 19 Mei 2008, dan telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 3 Juni 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 19 Mei 2008. Buku Bank tanggal 19 Mei 2008, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 19 Mei 2008;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor : 0010945 tanggal 16 Mei 2008 sebesar CIF USD 12,513.00 terlalu rendah dan tidak dapat diyakini sebagai nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karena itu koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan.

Hal 17 dari 19 hal. Put. No. 407/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Senin, tanggal 14 Januari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS dan Marina Sidabutar, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS
ttd.

Marina Sidabutar, SH.MH

K e t u a :
ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
ttd.
Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali ...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 2.500.000,-</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754